



Meilan Pakpahan¹
Rencan Carisma
Marbun²

KETAATAN KEPADA PEMERINTAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF ETIKA KRISTEN

Abstrak

Artikel ini membahas tentang ketaatan kepada pemerintah ditinjau dari perspektif etika Kristen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur atau studi pustaka. Dengan metode ini penulis dapat menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dan berkaitan dengan tujuan penelitian ini dan menuangkannya dalam sebuah hasil penelitian. Pemerintah atau pengereh adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Dalam perspektif etika Kristen, ketaatan kepada pemerintah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sikap hormat dan penuh tanggung jawab, karena pemerintah adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketaatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kasih terhadap sesama. Namun, etika Kristen juga mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemerintah bukanlah mutlak. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, umat Kristen harus memilih untuk menaati Tuhan lebih dahulu. Ketaatan ini harus dilakukan dengan cara yang damai, penuh kasih, dan menghindari kekerasan. Pendekatan ini menekankan bagaimana kita dalam mentaati pemerintah. Penelitian ini mengkaji bagaimana ketaatan kepada pemerintah ditinjau dari perspektif etika Kristen.

Kata Kunci: Ketaatan Kepada Pemerintah, Perspektif etika Kristen.

Abstract

This article discusses obedience to the government from the perspective of Christian ethics. This research uses literature research or library study methods. With this method the author can analyze literature sources that are relevant and related to the objectives of this research and express them in a research result. The government or pengereh is an organization that has the power to make and implement laws together with laws and the authority to regulate communities in certain areas, which are generally countries. In the perspective of Christian ethics, obedience to the government is an obligation that must be carried out with respect and responsibility, because the government is an institution established by God to maintain order and justice in society. This obedience is not only formal, but must be done with a sincere and loving heart towards others. However, Christian ethics also teaches that obedience to the government is not absolute. If the government issues regulations that conflict with God's commands, Christians must choose to obey God first. This obedience must be carried out in a peaceful, loving manner and avoiding violence. This approach emphasizes how we obey the government. This research examines how obedience to the government is viewed from the perspective of Christian ethics.

Keywords: Obedience To The Government, Christian Ethical Perspective.

PENDAHULUAN

Pemerintah atau pengereh adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintah juga adalah aktivitas pelayanan

^{1,2}Pascasarjana, Pendidikan Agama Kristen, IAKN Tarutung
 email: pakpahanmeilan@gmail.com, rencaris72@gmail.com

yang menjamin bekerjanya lembaga-lembaga pemerintahan umum dan berfungsinya unit-unit pemerintahan baik internal maupun eksternal, terhadap para warganya.

Kehidupan orang Kristen tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sebagai warga negara di dunia. Sebagai warga negara, orang Kristen sudah seharusnya mentaati segala peraturan yang dibentuk oleh pemerintah. Peraturan yang dibentuk itu idealnya untuk melindungi hak-hak warga negara dan menentukan tanggung jawab terhadap negara, juga untuk mengarahkan warga negaranya untuk berada pada jalur yang benar, ada sanksi-sanksi yang diberikan pada setiap pelanggaran. Maka peraturan yang dibentuk adalah untuk kebaikan warga negara bukan untuk menyusahkan atau bahkan menekan warga negaranya, sehingga sudah semestinya orang Kristen pun yang adalah warga negara harus bersikap taat kepada pemerintah yang terwujud di dalam mentaati setiap peraturan yang diberlakukan.

Etika Kristen sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Etika Kristen sebagai ilmu mempunyai fungsi dan misi yang khusus dalam hidup manusia yaitu perannya sebagai petunjuk dan penuntun tentang bagaimana manusia sebagai pribadi dan kelompok harus mengambil keputusan tentang apa yang seharusnya berdasarkan kehendak dan Firman Tuhan. Khusus bagi kehidupan umat Kristen pemerintah harus menjalankan pemerintahannya yang berpedoman pada ketentuan Etika Kristiani yang mencakup setiap aspek kehidupan dalam ruang lingkup individu, keluarga, kelompok sosial maupun dalam bernegara. Etika Kristen haruslah berjalan bersamaan, tindakan etis dan tanggung jawab melibatkan kepercayaan yang dipertaruhkan.

Ketika berbicara tentang bagaimana sebaiknya sikap orang Kristen terhadap pemerintah, orang sering memakai Roma 13:1-7 sebagai acuan. Pemerintah itu berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Dia sehingga kita yang ada di bawahnya harus takluk kepadanya, tidak boleh melawan. Namun, pemerintahan yang seperti apa yang harus ditaati oleh orang Kristen? bila suatu pemerintahan itu korup atau melakukan tindak kekerasan yang sewenang-wenang pantaskah orang Kristen tunduk pada pemerintahan itu? Untuk menjawab permasalahan inilah sehingga penulis membahas tentang ketatatan kepada pemerintah ditinjau dari perspektif iman Kristen.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif atau literatur di mana data yang terkumpul berbentuk kata-kata dan tidak menekankan pada angka. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif deskriptif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian literatur ini untuk mendapatkan referensi tentang “Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Etika Kristen”. Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi dan literatur seperti buku-buku dan jurnal sebagai sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Teori-teori dan sumber literatur yang digunakan oleh penulis tentunya sesuai dengan pembahasan judul penelitian ini. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis terhadap “Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Etika Kristen”. Setelah itu penulis melakukan kajian terhadap beberapa sumber informasi atau teori dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang masalah yang sebenarnya. Hal ini berarti penulis menganalisis sumber-sumber literatur yang relevan dan sesuai dengan maksud penelitian ini. Setelah itu penulis membuat kesimpulan dan memberikan solusi sesuai hasil penelitian literatur yang penulis lakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketaatan kepada pemerintah adalah topik yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pandangan Kristen, hal ini diatur dengan jelas dalam Alkitab. Etika Kristen mengajarkan bahwa umat Kristen harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berasal dari firman Tuhan dan salah satunya adalah ketaatan terhadap pemerintah. Namun, pandangan Kristen mengenai ketaatan kepada pemerintah juga tidak sederhana, karena mencakup berbagai nuansa moral dan teologis yang berkaitan dengan hubungan antara warga negara, otoritas duniawi, dan otoritas Tuhan.

Pengertian Ketaatan Kepada Pemerintah

Ketaatan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kepatuhan, kesetiaan, kesalehan dan fungsi untuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan. Pemerintah

atau pengereh adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Oleh karena itu maka ketaatan kepada pemerintah dapat diartikan sebagai kepatuhan, kesetiaan, ataupun kesalehan kepada pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum bersama Undang-Undang serta kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu dan tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan Negara.

Umat Kristen harus taat kepada pemerintah Karena ini adalah perintah Tuhan. Salah satu dasar utama untuk ketaatan kepada pemerintah dalam perspektif etika Kristen adalah keyakinan bahwa pemerintah adalah institusi yang diatur oleh Tuhan. Dalam Alkitab, khususnya dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, dia menekankan bahwa semua otoritas pemerintah berasal dari Tuhan dan bahwa umat Kristen harus tunduk kepada pemerintah yang ada sebagai bagian dari ketaatan kepada Tuhan. "Setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang lebih tinggi, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintahan yang ada, ditetapkan oleh Allah." (Roma 13:1). Ayat ini jelas menyatakan bahwa otoritas pemerintah adalah bagian dari rencana Allah untuk menciptakan tatanan yang adil dan tertib dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemerintah dilihat sebagai ketaatan kepada Allah yang lebih tinggi. Pemerintah, dalam pandangan Kristen, berfungsi untuk menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan melindungi keadilan dalam masyarakat.

Dasar Teologis Ketaatan kepada Pemerintah

1. Pemerintah sebagai Institusi yang Diatur oleh Allah

Dalam pandangan Kristen, pemerintah adalah alat yang dipakai Allah untuk memelihara ketertiban dan keadilan di dunia. Roma 13:4 menyatakan bahwa pemerintah adalah "hamba Allah untuk kebaikanmu." Oleh karena itu, ketaatan kepada pemerintah dilihat sebagai bagian dari ketaatan kepada kehendak Allah.

2. Etika Kristen dan Keadilan

Ajaran Kristen menekankan pentingnya keadilan, kasih, dan belas kasih. Ketika pemerintah bertindak sesuai dengan nilai-nilai ini, ketaatan menjadi bagian dari tanggung jawab moral umat Kristen. Sebaliknya, jika pemerintah bertindak tidak adil atau melanggar hak asasi manusia, umat Kristen dihadapkan pada dilema moral.

Ketaatan yang harus dilakukan oleh orang percaya adalah sebagai berikut:

a. Ketaatan kepada Pemerintah dengan Tanggung Jawab Moral

Etika Kristen menekankan bahwa ketaatan kepada pemerintah tidak hanya bersifat eksternal atau formal, tetapi juga harus dilakukan dengan kesadaran moral yang dalam. Ketaatan bukan sekadar mematuhi hukum, tetapi juga mencakup sikap yang tulus dan bertanggung jawab sebagai bagian dari kontribusi kita dalam membangun masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. "Tetapi jika kamu berbuat jahat, takutlah, karena tidak tanpa sebab pemerintah memegang pedang; sebab pemerintah adalah pelayan Allah untuk membalaskan murka-Nya kepada orang yang berbuat jahat." (Roma 13:4). Ayat ini mengingatkan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman bagi mereka yang berbuat jahat. Sebagai umat Kristen, kita diajak untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan mengikuti hukum yang berlaku, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan menjaga kedamaian dalam masyarakat.

b. Ketaatan sebagai Bentuk Kasih dan Penghormatan kepada Sesama

Dalam etika Kristen, ketaatan kepada pemerintah juga dilihat sebagai bagian dari kasih kita kepada sesama. Dengan mematuhi hukum yang berlaku, kita menunjukkan sikap saling menghormati dan menjaga kedamaian dalam masyarakat. Alkitab mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari hidup Kristen, dan salah satu bentuk kasih kepada sesama adalah dengan hidup sesuai dengan peraturan yang ada untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih baik. "Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat." (Roma 13:7). Ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada pemerintah adalah cara praktis untuk menunjukkan kasih dan penghormatan kepada sesama. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi contoh yang baik dalam

masyarakat dengan menaati hukum yang ada, termasuk membayar pajak dan berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

c. Ketaatan dengan Sikap Terang dan Garam dalam Masyarakat

Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini (Matius 5:13-16). Ketaatan kepada pemerintah, dalam perspektif etika Kristen, juga berfungsi sebagai cara kita untuk menjadi saksi hidup bagi dunia ini. Ketika kita taat kepada pemerintah, kita menunjukkan sikap yang positif dan mendukung tatanan sosial yang baik, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan kita bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi sebagai bagian dari panggilan kita untuk membawa pengaruh positif bagi dunia di sekitar kita. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." (Matius 5:16). Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menjadi contoh dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada, yang pada gilirannya akan membawa orang lain untuk memuliakan Tuhan. Ketaatan kita terhadap pemerintahan adalah salah satu bentuk pengaruh positif yang dapat kita berikan kepada dunia ini.

d. Ketaatan dan Doa bagi Pemimpin

Sebagai bagian dari ketaatan kepada pemerintah, etika Kristen juga mengajarkan pentingnya berdoa bagi pemimpin dan pemerintah. Kita diajak untuk tidak hanya taat kepada otoritas pemerintahan, tetapi juga untuk mendukung mereka dalam doa agar mereka memerintah dengan bijaksana, adil, dan sesuai dengan kehendak Tuhan. "Berdoalah untuk raja-raja dan semua orang yang berkuasa, supaya kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan penghormatan." (1 Timotius 2:1-2). Ayat ini mengajarkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus mendoakan pemimpin kita, agar mereka memimpin dengan hikmat dan kedamaian. Doa ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara Kristen untuk mendukung pemerintah yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip moral Tuhan.

Meskipun Alkitab mengajarkan ketaatan kepada pemerintah, ada satu prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam etika Kristen: ketaatan kepada Tuhan harus lebih utama daripada ketaatan kepada manusia. Jika suatu kebijakan atau peraturan pemerintah bertentangan dengan perintah Allah, maka umat Kristen harus memilih untuk menaati Tuhan daripada pemerintah. Ini terlihat dalam kisah para rasul ketika mereka diperintahkan untuk tidak mengajar tentang Yesus, tetapi mereka tetap memilih untuk taat kepada Allah. "Kami lebih harus taat kepada Allah daripada kepada manusia." (Kisah Para Rasul 5:29). Dengan kata lain, ketaatan kepada pemerintah tidak bersifat mutlak. Jika hukum atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan firman Tuhan, perlawanan terhadap rezim otoriter melanggar hak asasi manusia atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani umat Kristen dipanggil untuk menegakkan prinsip kebenaran Tuhan, bahkan jika itu berarti menentang kebijakan pemerintah. Namun, penentangan ini harus dilakukan dengan cara yang penuh kasih dan damai, tanpa kekerasan.

John Stott dalam bukunya *The Message of Romans*, menyatakan bahwa ketaatan kepada pemerintah harus didasarkan pada fungsi pemerintah sebagai pelayan Allah. Namun, ia menekankan bahwa ketaatan ini bersyarat, tergantung pada sejauh mana pemerintah menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Bonhoeffer, seorang teolog Jerman, mengambil sikap tegas terhadap pemerintahan Nazi. Dalam tulisannya, ia mengajarkan bahwa ketika pemerintah menjadi instrumen ketidakadilan, umat Kristen memiliki tanggung jawab untuk menentangnya demi menegakkan kehendak Allah. Hauerwas menyoroti pentingnya komunitas Kristen dalam menilai tindakan pemerintah. Menurutnya, gereja memiliki peran profetik untuk menegur pemerintah yang menyimpang dari prinsip keadilan dan moralitas.

Ketaatan kepada pemerintah bukan dilakukan dengan serampangan dan tanpa arah, sekelompok masyarakat atau individu dapat melakukan ketidaktaatan kepada pemerintah karena adanya pemicu terlebih dahulu baik itu kebijakan pemerintah maupun sikap aparat negara sendiri di dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memunculkan adanya ketidakadilan. Tetapi perlu dicatat bahwa ketidaktaatan kepada pemerintah bukan dilakukan jika sudah berada di dalam keadaan yang terpojok atau terdesak, tetapi dilakukan

sebagai usaha sadar, sistematis, terstruktur untuk menentang dan menantang kekuasaan negara yang di dalam kebijakan publiknya tidak adil bagi masyarakat.

Ketidaktaatan kepada pemerintah yang dapat dilakukan oleh orang percaya sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka kepada pemerintah adalah ketika terjadi:

- a. **Diskriminasi Gender, Etnis dan Agama**
Ketidaktaatan kepada pemerintah pernah terjadi karena diskriminasi salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Martin Luther King, di mana King berjuang untuk kesamaan hak untuk kaum kulit hitam di Amerika Serikat, dipandang sebagai ancaman mendasar bagi demokrasi dan moral Amerika. Hal ini merupakan keharusan yang niscaya yang menantang gereja. Semua warga Negara seharusnya kedudukannya sama di muka hukum, tetapi di dalam praktiknya seringkali banyak diskriminasi yang terjadi.
- b. **Bertentangan dengan Iman**
Di Indonesia dengan adanya otonomi daerah, maka daerah mempunyai kebijakan untuk membentuk peraturan daerah. Beberapa daerah di Indonesia membentuk peraturan daerah yang begitu kental dengan muatan agama tertentu. Di dalam hal ini termasuk pada Perda Pyariah, Perda Injil. Keterlibatan negara di dalam keagamaan akan menjadikan agama itu terdistorsi di dalam berbagai aspeknya. Iman termasuk di dalam ranah pribadi setiap orang, yang seharusnya tidak dapat dicampuri oleh pihak mana pun.
- c. **Kebebasan Beragama dan Kebebasan Beribadah yang Ditekan**
Indonesia di dalam UUD 1945 menjamin kebebasan warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaannya itu, tetapi perlindungan terhadap golongan agama minoritas sepertinya tidak terealisasi. Kebebasan beragama adalah kebebasan seseorang untuk memilih agamanya bahkan berganti agama asalkan tidak mengacau dan merugikan negara, karena ini adalah hak asasi yang dasar. Kebebasan beragama yang ini tidak boleh dihalangi oleh siapapun termasuk negara, tidak boleh diatur dalam peraturan publik apa pun bentuknya karena termasuk dalam ranah privat. Kebebasan beragama ini berkaitan erat dengan kebebasan beribadah yang bersumber pada Allah yang menguasai hati nurani manusia yang bebas, tanpa kecuali, siapa pun, di mana pun, sesuai keadilan dan kebenaran di masyarakat.
- d. **Ketidakadilan Sosial: Kemiskinan, Upah Buruh**
Ketidakadilan sosial biasanya berkaitan pada masalah kesejahteraan secara ekonomi bagi warga negara. Cita-cita bangsa ini adalah membawa kesejahteraan bagi rakyat, termasuk di dalamnya adalah faktor ekonomi. Di dalam sila kelima Pancasila juga disebutkan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sukarno menjelaskan bahwa keadilan sosial adalah suatu masyarakat yang adil dan makmur, berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan, cukup sandang, cukup pangan.
- e. **Kegagalan Menyelesaikan Kasus HAM**
Hak Asasi Manusia adalah isu yang paling sensitif pada saat ini. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau yang hakiki dari seorang manusia, semuanya ini sudah dirangkumkan di dalam Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia oleh PBB, di mana Indonesia menjadi anggotanya juga. Beberapa hak itu adalah hak untuk memeluk agama, hak untuk berpindah agama, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak orang tua untuk mendidik anaknya, hak mendapatkan pekerjaan, hak milik. Dilanggarnya Hak Asasi Manusia ini dapat memicu ketidaktaatan sipil, karena perlindungan HAM sangat dijunjung dunia internasional, dan hal inipun dengan jelas diatur di dalam UUD 1945. HAM merupakan kewenangan yang melekat pada manusia sebagai manusia, yang harus diakui dan dihormati serta dilindungi oleh pemerintah.
- f. **Korupsi Berjamaah dan Kepincangan Penegakan Hukumnya**
Korupsi menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara. Masalah korupsi ini sepertinya sudah menjadi “makanan” sehari-hari di dalam pemberitaan media massa. Indonesian Corruption Watch

mengungkapkan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sudah terstruktur sedemikian rupa hingga hampir sempurna. Sebuah pendapat mengatakan bahwa korupsi akan terus berulang karena merupakan sebuah masalah politik, yang membutuhkan investasi tambahan oleh pemerintah. Menurut J. E. Sahetapy, hukum di Indonesia sudah menjadi rusak dan rancu, bukan karena isi dari hukum itu sendiri yang rancu sehingga menabrak berbagai esensi kebenaran, UUD untuk mencegah supaya kekuasaan negara jangan sampai absolut baik itu HAM, diskriminasi, tetapi lebih kepada mentalitas manusianya.

g. Demokrasi Semu

Kekuasaan suatu rezim di dalam satu negara dalam jangka waktu yang sangat panjang menggelisahkan rakyat. Permasalahan di dalam demokrasi erat kaitannya dengan permasalahan pemilu, berdasarkan arti katanya sendiri sebagai kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini pernah terjadi di Indonesia ketika dinasti Soeharto memerintah selama 32 tahun, di masa ini juga gereja tidak pernah menghadapinya secara prophetic, tetapi secara priestly yang hanya berkutat pada doa-doa untuk bangsa dan negara, tanpa berbuat sesuatu. Beberapa tahun belakangan ini hal yang sama juga terjadi di belahan dunia Afrika dan Asia Tengah yang sangat kental akan pemerintahan yang otoriter.

Perspektif Etika Kristen

Etika Kristen adalah cabang dari teologi yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang diakui oleh komunitas Kristen. Etika Kristen berdasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah sumber segala kebenaran moral, dan orang Kristen diberi petunjuk moral melalui ajaran dan teladan Yesus Kristus dalam Alkitab. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* (kata tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta, etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *Mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup.

Etika dan Moralitas memiliki kesamaan, yang berasal dari kata “*mos*”, dan dalam bentuk jamak diartikan sebagai “*tata karma*” yang berarti kebiasaan atau cara hidup. Istilah kata etika dan moral memiliki kesamaan namun berbeda pada penggunaan sehari-hari. Moralitas digunakan untuk tindakan yang akan dievaluasi, sedangkan etika digunakan untuk mengevaluasi nilai-nilai yang ada. Moralitas cenderung ke hal-hal praktis, sedangkan etika cenderung ke hal-hal teoritis. Dari segi etimologi (ilmu yang mempelajari asal usul kata), etika berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti kebiasaan (*costume*) atau tata krama. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang asas-asas moral. Bahasa ini menunjukkan bahwa etika berkaitan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia.

Secara terminologi etika adalah cabang filsafat yang membahas tentang perilaku atau tindakan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. Yang dapat dinilai baik atau buruk adalah sikap manusia yaitu perbuatan, tingkah laku, gerak, perkataan dan sebagainya. Etika kristiani meliputi seluruh kehidupan manusia, sehingga tidak hanya terbatas pada hal-hal rohani dan gerejawi saja, tetapi juga pada hal-hal duniawi. Etika Kristen tidak terbatas pada kehidupan pribadi tetapi juga menyangkut masalah budaya, ekonomi, politik dan kehidupan berhubungan dengan pemerintahan.

Pada hakikatnya ciri-ciri etika Kristen adalah kasih. Kewajiban manusia dalam hukum untuk mengasihi Allah dan sesama. Etika Kristen berkaitan dengan perbuatan-perbuatan lahiriah maupun dengan hati manusia. Namun sebelum itu, orang-orang Kristen harus menyadari bahwa semuanya itu sumbernya dari Allah. Manusia tidak akan mampu beretika dengan kekuatannya sendiri, namun oleh karena Allah yang menetapkannya dalam diri orang Kristen. Oleh karena itu, orang yang dapat mengasihi dengan tulus adalah orang-orang yang berada dalam Allah. Etika Kristen adalah tanggapan kepada kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Kehidupan etis merupakan cara untuk memberi syukur atas anugerah Allah dan cara untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah.

Etika Kristen merupakan “etik teosentris” dan “etik teonom” yang artinya menempatkan Allah dan karyaNya sebagai titik tolak. Tetapi karena etika ini juga menaruh perhatian kepada pribadi dan karya Kristus, maka ia disebut juga “etik Kristosentris” dan “etik Kristonom”.

Dengan demikian, etika Kristen merupakan “etik transenden” yang artinya mendasarkan penilaian etis pada norma-norma dan nilai-nilai yang melampaui akal dan perasaan manusia. Jadi, etika Kristen merupakan etika normatif. Etik Kristen digambarkan juga sebagai ‘etik injili, etik kemerdekaan, etik damai sejahtera’, sebab etik Kristen bertumpu pada karya Allah.

Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.

Adapun menurut Burhanuddin Salam, istilah etika berasal dari kata latin, yakni “ethic, sedangkan dalam bahasa Greek, ethikos yaitu a body of moral principle or value Ethic, arti sebenarnya ialah kebiasaan, habit. Jadi Etika Kristen secara umum mengacu pada seperangkat nilai dan prinsip moral yang diikuti oleh penganut agama Kristen. Ini mencakup ajaran-ajaran Alkitab, seperti Sepuluh Perintah Allah, serta ajaran-ajaran Kristus tentang kasih, keadilan, dan integritas. Etika Kristen mendorong individu untuk hidup sesuai dengan standar moral yang diakui dalam konteks keyakinan Kristen, dengan fokus pada cinta kasih terhadap Tuhan dan sesama. Menurut Webster Dictionary, secara etimologis, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, mana tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.

Dari pendapat para ahli diatas maka penulis menyimpulkan Etika Kristen adalah suatu ajaran dan perbuatan yang baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Maka di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah seharusnya menjalankannya yang sesuai dengan etika Kristen yaitu baik dan benar sesuai yang diajarkan oleh Firman Tuhan. Dengan demikian maka semua orang percaya wajib tunduk dan taat kepada pemerintah.

SIMPULAN

Dalam perspektif etika Kristen, ketaatan kepada pemerintah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan dengan sikap hormat dan penuh tanggung jawab, karena pemerintah adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Ketaatan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi harus dilakukan dengan hati yang tulus dan penuh kasih terhadap sesama.

Namun, etika Kristen juga mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemerintah bukanlah mutlak. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan yang bertentangan dengan perintah Tuhan, umat Kristen harus memilih untuk menaati Tuhan lebih dahulu. Ketaatan ini harus dilakukan dengan cara yang damai, penuh kasih, dan menghindari kekerasan.

Selain itu, ketaatan kepada pemerintah juga menjadi bentuk kasih kita terhadap sesama, untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam di dunia ini, menunjukkan contoh yang baik, dan mendukung pemerintahan yang adil melalui doa dan perbuatan kita. Ketaatan kita kepada pemerintah seharusnya mencerminkan hidup yang sejalan dengan kehendak Tuhan dan membawa berkat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonhoeffer, Dietrich. *The Cost of Discipleship*. New York: Touchstone, 1995.
- Carl H. Esbeck. 2003. “Equal Treatment: Its Constitutional Status” dalam *Equal Treatment and Societal Pluralism*, Stephen V. Monsma & J. Christopher Soper, ed. (Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>
- Harahap, Sofyan S . 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat)
- Hasan, Erliana (2014). *Komunikasi Pemerintahan (dalam bahasa Inggris)*. 1. Jakarta: Universitas Terbuka. hlm. 1–54. ISBN 978-979-011-461-6.
- Hauerwas, Stanley. 1983. *The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- J. E. Sahetapy. 2000. “Hukum dan Iman Kristiani” dalam *Perjuangan Menantang Zaman*, Hendra G. Mulia, ed. (Jakarta: Reformed Institute Press).

- John W. De Gruchy. 1995. Agama Kristen dan Demokrasi terj. Martin Lukito Sinaga (Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- K. Bertenz. 2007. Etika (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)
- Lihat Universal Declaration of Human Rights pasal 17-19, 23, 26.
- Malcoolm Brownlee. 2006. Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor di Dalamnya (Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Nata, Abuddin . 2012. Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sibirian, Togardo. "Civil Disobedience: Suatu Kasus Bagi Etika Kristen".
- Sukarno, 2001. Pancasila Sebagai Dasar Negara (Jakarta: Gunung Agung) Sirait, Saut. 2000. Politik Kristen Di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia)
- Siregar and others.
- Stott, John. The Message of Romans. Leicester: InterVarsity Press, 1994.
- Theodore M. Smith, "Korupsi, Tradisi dan Perubahan di Indonesia" dalam Korupsi Politik, Mochtar Lubis dan James C. Scott ed., (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993)
- Togardo, Sibirian. 2007. "Demokrasi, Politik, dan Keprihatinan Kristen di Indonesia" dalam Jurnal Teologi Stulos Volume 6 (Bandung: STTB)
- Zubair, Achmad Charris. 1980. Kuliah Etika. Jakarta: Rajawali Pers: 1980), Cet. II, hal. 13
- Zaluchu, Sonny. 2018. Sudut Pandang Etika Kristen Menyikapi Pembangkangan Sipil (Civil Disobedience). DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani.
- Wright, N.T. 2004. Paul for Everyone: Romans Part 1. London: SPCK Publishing.